

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743

=====
KOMPAS Minggu, 21-04-1991. Halaman: 10

SENISONO KONTEKS "SINI" DAN BUKAN "SONO"
Tanggapan Untuk Hardi
Oleh Linus Suryadi AG

SENISONO adalah bangunan bernilai sejarah dan kebudayaan. Keberadaannya patut dipertahankan. Pihak yang punya kompetisi terhadap gedung bangunan penjajah Belanda 1915 itu kini, bukan hanya para seniman dan budayawan. Tapi juga para mantan pejuang Angkatan 45 yang bernaung di balik nama Pembela Tanah Air dan Tentara Rakyat Mataram. Bahkan para arsitek dan saksi sejarah perjuangan RI punya monumen konkret, yang betapapun nilai abstraknya tidak bisa diganti dengan gedung baru sangat megah dan mewah.

Jika memang gedung Senisono bobot arsitekturalnya rendah, tidak sebagus arsitektur di Negeri Belanda, Inggris, Jerman, Swiss, Perancis, hal itu bukan alasan masuk akal buat dipertimbangkan untuk membuldozer bangunan tua itu. Dengan segenap kondisinya kini, yang mengundang pemugaran atau restorasi, pada dasarnya Senisono adalah fakta sejarah dan budaya yang konkret. Persoalannya bukan baik dan buruk sebuah gedung tua, tapi sikap dan pandangan di dalam menghargai nilai sejarah dan kebudayaan itulah yang terutama. Seperti halnya sikap orang muda yang menyimpan kerendah-hatian untuk menghargai orangtuanya masing-masing, yang miskin dan tidak tampan atau cantik.

Yang dibutuhkan ialah akal sehat bahwa, skala kota Yogya memang tidak seluas kota Jakarta. Arsitek pendahulunya, Pangeran Mangkubumi pada tahun 1775 pasti tidak menyangka bahwa, pilihan lokasi kraton Mataram Baru itu akan menjadi ajang akumulasi kaum muda terpelajar dari seluruh Indonesia. Dan arsitek penjajah Belanda yang membangun Gedung Agung, gedung Senisono, benteng Vredeburg, dan gedung PWI pada waktu itu, juga tidak memperhitungkan akan ada mandala lain selain kraton Yogyakarta. Kedua arsitek pada zamannya tersebut, akhirnya juga tidak punya antisipasi ke depan bahwa, kawasan jantung kota Yogya akan mengalami destruksi yang didasarkan pada otoritas kekuasaan dan ekonomi dari jauh umpamanya untuk toko serba-ada dan taman berkolam.

SAYA kira justru sekelompok arsitek dibawah payung Dirjen PU Cipta Karya dan Bapeda propinsi DIY yang memanjakan citra romantik murahan perihal kawasan Malioboro, tatkala gedung kesenian yang luasnya tidak jauh beda dengan Gedung Kesenian Jakarta itu, justru hendak dibongkar dan diganti taman berkolam.

Sedangkan para seniman dan budayawan dalam arti: budayawan adalah juga seniman yang punya komitmen kuat pada dinamika di tengah lingkungan hidupnya dalam hal Senisono lebih realistik. Mereka mengajukan pertimbangan dari berbagai dimensi, supaya tidak digusur rata dengan tanah.

Satu tahap lebih maju dari nenek moyangnya, yang tidak begitu menghiraukan warisan sejarah kebudayaannya dengan cara merawat dan memelihara. Sejak abad 7 sampai abad 19, apa yang disebut kraton dan

segenap bangunan yang tersebar di wilayah kekuasaan kerajaannya, tidak pernah selamat dari napsu destruksi. Akibatnya kraton dan kerajaannya timbul dan tenggelam, tapi tanpa bekas-bekas cukup bernilai di tanah Jawa. Praktek bongkar-pasang sebuah bangunan semacam itu perlu revisi berskala global.

Adapun tahap lebih maju di atas ialah dalam pengertian praktek tambal-sulam bangunan yang sudah ada. Sikap nihil serta mengabaikan monumen-monumen berkonteks historis konkret, bukan lagi masanya di zaman Indonesia merdeka, sedang monumen-monumen baru dibangun tanpa perhitungan yang berdimensi dulu-kini-nanti. Kesadaran terhadap nilai sejarah kebudayaan, bahkan juga nilai arkeologis di kawasan ini diingkari atau diakui sebenarnya masih bertaraf rendah.

Bagi kalangan generasi tua yang terlibat konkret dalam era revolusi kebangsaan, dapat berkata seperti Romo YB Mangunwijaya: "Pemusnahan Senisono tidak dapat dibenarkan secara apapun. Sebab, pemusnahan itu, pada hakekatnya, merugikan semua pihak. Baik pemerintah, seniman, masyarakat dan kebudayaan Yogya itu sendiri. Saya tidak mengerti, kepentingan apa yang melahirkan keputusan ini. Ketika itu pak Harto menjadi Komandan Batalyon X di Yogya. Sehingga beliau sampai sekarang sangat terkait secara historis dengan Senisono. Beliau bukan hanya dengan gampang mempertahankan Senisono, tapi juga mestinya punya kepentingan dan romantisme untuk itu" (Bernas, Jumat 5 April 1991).

Fakta sejarah semacam itu diperkuat oleh kesaksian bisu gedungnya, ketika dia dijadikan tempat Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk Kongres Pemoeda I, sehingga "Senisono itu terlampau bersejarah untuk digusur begitu saja".

YANG lebih memprihatinkan justru bekas Socitet Militer, yang letaknya sebelah selatan Pasar Besar Beringharjo konon sebagai alternatif pengganti tatkala semua orang tahu bahwa, halaman yang sempit itu sudah dipakai para pedagang palawija. Para bakul yang tua-tua, yang notabene memenuhi kebutuhan para priyayi gung dan kaum urban kota Yogyakarta, sudah was-was andaikata kena gusur Pemda DIY. Para pedagang tua tersebut, pada era revolusi merebut Yogya Kembali atau era sebelumnya, sudah pula memenuhi keperluan dapur para pengelola republik. Dan sebagaimana umumnya wong cilik: mereka tidak pernah berubah taraf hidup pada zaman Indonesia merdeka.

Jika lahan dagang para bakul itu kena gusur, dengan alasan Socitet Militer akan dirombak untuk bangunan gedung kesenian, bukan main mengenaskan nasibnya. Ke mana lagi akan berjualan di zaman pembangunan ini? Lokasi jalan ke timur-barat di samping Pasar Besar itu sudah penuh para pedagang palawija dan kebutuhan dapur lainnya. Mereka tidak beda dengan bandeng atau teri yang dipepes dalam udara pengab dan kotor, tapi tetap juga bertahan demi hidup tambal-sulam saban harinya. Restorasi Pasar Gede belum juga beres, bahkan anehnya: para pedagang palawija akan ditempatkan di lantai dua oleh para pengelola pembangunan pasar. Itulah sebabnya, wong-wong cilik itu mengadu ke makam Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di Imogiri.

Kendati pun pelaksana pembangunan adalah Pemda DIY, tapi para pemakai lokasi yang dirancang-bangun adalah rakyat kebanyakan, dalam hal ini para bakul cilik dan seniman. Karena itu, sebuah lokasi gedung kesenian yang berdempetan dengan pasar, sudah pula mendepak para bakul kecil, akan menimbulkan pemeo getir: para seniman tergusur dari sebuah lokasi kesenian yang mapan, mereka terpaksa menggusur para pedagang kecil yang sudah mapan pula. Para seniman dan bakul kecil yang mengalami keterpaksaan demikian tidak akan pernah punya citra yang baik terhadap para pengelola pembangunan, Pemda DIY.

Pada periode lebih lanjut, seperti halnya pembangunan gedung

kesenian di lokasi THR Jalan Brigjen Katamsa yang tidak mengajak dialog dan konsultasi dengan para seniman bernasib sunyi dan sepi. Jarang sekali ada seniman Yogya yang pentas atau kluyuran, berdiskusi, dan memanfaatkan gedung jelek itu. Itu pun sebuah antisipasi yang patut diperhitungkan para pengelola pembangunan kota gudeg, ketika selama ini setiap pembangunan gedung kesenian tidak pernah mengajak rembugan para calon pemakai.

Bisakah dibayangkan, ketika logika lumrah para seniman Yogya sampai pada refleksi rasa: kiprah mereka di bekas Socitet Militer, pada hakikatnya, adalah kiprah di atas punggung para bakul palawija, yang entah tergusur ke mana?

BOLEH jadi pola gusur menggusur pada era ini juga menyangkut wilayah kota Yogya dalam skala yang luas. Dia akan menjadi jamak dan lumrah. Tapi dia juga menjadi ironi getir bagi mereka yang mengaku mewariskan nilai-nilai dan cita-cita Angkatan 45, terutama pada Yogya yang berpredikat kota budaya dan kota wisata.

Bongkar Senisono dan bongkar Socitet Militer merupakan langkah kebijakan yang tidak perlu, ditinjau dari segi fungsi dan segi pragmatik justru merupakan manifestasi anti-sejarah kebudayaan dan anti-sejarah revolusi kebanggaan. Dia juga merupakan praktek pemborosan dana pembangunan Repelita V tahun 1991.

Baik SK dan DIP yang sudah turun, yang tahap I mencapai Rp 600 juta dari Dirjen PU Cipta Karya, seyogyanya dialih-fungsikan untuk usaha pembangunan yang lebih bermakna dan lebih berjangka panjang bagi dinamika kota Yogya. Di sini dapat saya ikhtisarkan beberapa perspektif yang semoga memperoleh sambutan para pelaksana pembangunan dan para penentu kebijakan pembangunan:

Pertama, Gedung Senisono yang selama ini hanya rusak atap dibagian panggung dan jebol panggungnya, dipugar menjadi bertingkat dua. Di atas untuk ruang pameran dan di bawah untuk ruang pementasan. Dilengkapi akustik dan listrik yang memadai, sehingga Senisono menjadi filter gedung kesenian bertingkat nasional dan internasional. Bagi masyarakat, pemerintah, dan seniman Yogya khususnya dan Indonesia umumnya, dengan usaha itu akan mempunyai kebangsaan kebudayaan dan sangat ideal bagi kota budaya dan wisata.

Kedua, Bekas benteng Vredeburg dan lokasi Shopping Centre yang masih terikat kontrak 10 tahun lagi), sebagaimana usulan Dewan Kesenian Yogyakarta yang disampaikan kepada Dirjen PU Cipta Karya dan Dirjen Kebudayaan akhir Maret lalu), diubah fungsi sebagai Art Centre. Hal itu pun sesuai dengan amanat para pelopor kebangsaan yang sudah wafat, antara lain Bung Karno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Ki Hajar Dewantoro. Kiranya Presiden Soeharto punya citarasa yang sama-sama mulia, ketika tokoh yang satu ini juga punya komitmen yang besar terhadap kebudayaan di masa depan.

Ketiga, Pembangunan 5 buah Gelanggang Remaja Yogyakarta, yang dapat mengambil pola mirip tapi tidak sama dengan Gelanggang Remaja Jakarta. Walaupun sudah punya Menteri Pemuda dan Olahraga, akan tetapi kebutuhan urgen bagi kaum remaja dan muda di kota propinsi ini belum terpenuhi, sehingga kesenian dan kebudayaan massa menjadi satu-satunya alternatif yang mengocok jiwa dan angan-angan mereka. Itupun masih bersifat improvisatoris, belum lagi tersedia gedung-gedung rekreasi sehat untuk mengembangkan bakat dan ketrampilannya.

Kebutuhan Gelanggang Remaja Yogyakarta ini dapat diproyeksikan kepada semua kota propinsi dan kota madya di Indonesia, ketika sama diketahui bahwa, kota-kota tersebut juga dipenuhi remaja dan pemuda tapi belum punya arena kiprah kegiatan yang sepadan dan mapan. Tempat semacam itu dapat menjadi multifungsi bagi mereka, untuk tidak hanya terserap kepada kesibukan birokratis dan administratif belaka, seperti halnya umumnya organisasi pemuda dan remaja dewasa

ini.

Pembangunan kembali Senisono, Art Centre dan Gelanggang Remaja Yogyakarta itu tidak hanya sampai bentuk phisiknya. Yayasan Senisono yang sudah mengelola selama 24 tahun dan berakte Notaris, hanya mendapat sumbangan Pemda DIY tiap bulan sebesar 75 ribu rupiah untuk bayar listrik dan air ledeng. Kondisi miskin propinsi DIY memang tidak memungkinkan merengkuh dan membantu dana lebih besar. Itu pun para seniman dan budayawan Yogya pada maklum pada taraf kemampuan finansial Pemdanya. Karena itu, 3 program dan proyek besar itu butuh dukungan dana pemeliharaan dan perawatan dari Pemerintah Pusat.

YANG keempat, pembangunan sejumlah taman kota di kota Yogyakarta, namun yang fungsinya memang untuk taman bagi warga kotagudeg. Fungsi taman di kota Yogya selama ini untuk memenuhi kebutuhan ritual, justru dipagari dan orang banyak tidak boleh menginjakkan kaki ke dalamnya. Taman kota yang banyak jumlahnya akan menjadiantisipasi ke masa depan bagi kota besar, yang menjadi "oase" para penghuni dan pengunjunnya.

Sebuah ironi pembangunan kota di Indonesia ialah ketika etos pembangunan digalakkan tapi justru pohon-pohon besar yang mempunyai kota tropis ditebang dan tanpa pengganti, sehingga memberikan citra bahwa, para pelaksana pembangunan kota sedang kejangkitan semangat "demam urbanisasi" dan anti kehijauan.

Dan jika sampai terjadi gedung Senisono dan gedung PWI rata tanah, malah dijadikan taman berkolam, akhirnya prakarsa tersebut memperburuk citra para arsitek Indonesia dan menyediakan penilaian blero: sejumlah arsitek punya citarasa artifisial dan menawarkan keasyikannya sendiri kepada warga kota Yogya, yang notabene punya komitmen untuk menyayangi wilayah huniannya.

Jangan dikira bahwa, seperti tulisan Hardi (Kompas, Minggu 14 April 1991), para seniman dan budayawan Yogya sudah kehilangan semangat kerakyat-jelataan dan silau oleh bom kesenian Indonesia terutama bom seni lukisnya. Jangan pula dikira bahwa mereka lupa pada taraf kemampuan pemerintah propinsi DIY-nya yang tidak cukup kaya untuk memboroskan uang dana pembangunan Repelita V, sekadar untuk taman berkolam yang artifisial. ***

(Linus Suryadi AG, Seorang penyair, tinggal di Yogya)